

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, merupakan lembaga legislatif pada Tingkat daerah di Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. DPRD memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, dan penganggaran di daerah. Dalam kedudukannya pemerintah daerah mencakup pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang memberikan ciri kekuasaan yang berada di tangan rakyat. DPRD diberikan amanah untuk menjalankan kekuasaannya oleh rakyat, dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan rakyatnya maka memberikan manfaat dan nilai untuk rakyat.

Pada era orde baru, kedudukan DPRD merupakan dari unsur pemerintahan daerah seperti yang terdapat pada pasal 11 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan yang sejajar tersebut merupakan DPRD bersama dengan Kepala Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang meliputi berbagai bidang menurut pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan atau yang disingkat DPRD Tangsel ini merupakan lembaga legislatif unikameral yang berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Dewan yang berada di DPRD Kota Tangsel terdiri dari 50 anggota yang dipilih dari 7 dapil dengan menggunakan sistem representasi proposional terbuka pada pemilihan umum Legislatif Indonesia 2019.

Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan, yang terdiri:

Tabel 2. 1. Nama Jabatan dan Partai Politik

No.	Jabatan	Nama	Partai Politik
1.	Ketua	H. Abdul Rasyid, S.Ag., M.A.P	Partai Golongan Karya
2.	Wakil Ketua I	Iwan Rahayu, S.E.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Wakil Ketua II	Li Claudia Chandra	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Wakil Ketua III	Mustopa, S.Sos.I	Partai Keadilan Sejahtera


SEKRETARIAT DINAS PEMERKAAAN RAKYAT DAERAH
UPRAJAT KOTA TANGKARANG SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



SEKRETARIS DPRD
WANTUHI LEBRONO, S.P., M.A.
19740703 1990311 1 001
 Pembina Utama Madya, D.D.

KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR	KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR	KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR	KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR
 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.
 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.
 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.
 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.	 KABANG FUNGSI/KELOMPOK/KELOMPOK DASAR PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DR. DEDY BUDI SANTANA, S.H., M.H. 19630101 1980311 2 001 Pembina I, D. D.

Dalam menjalankan kebijakannya terdapat struktur organisasi secretariat DPRD yang mempunyai regulasi dan kebijakan di setiap daerah. struktur organisasi secretariat DPRD ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dinamika lokal. Terdapat empat bagian yang terdapat dalam struktur organisasi secretariat DPRD.

Lambang daerah sebagai suatu identitas daerah, sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang di maksud. Lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan di dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. berdasarkan pada logo tersebut terdapat visi dan misi Walikota Tahun 2021-2026 yaitu:

“ Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien ”

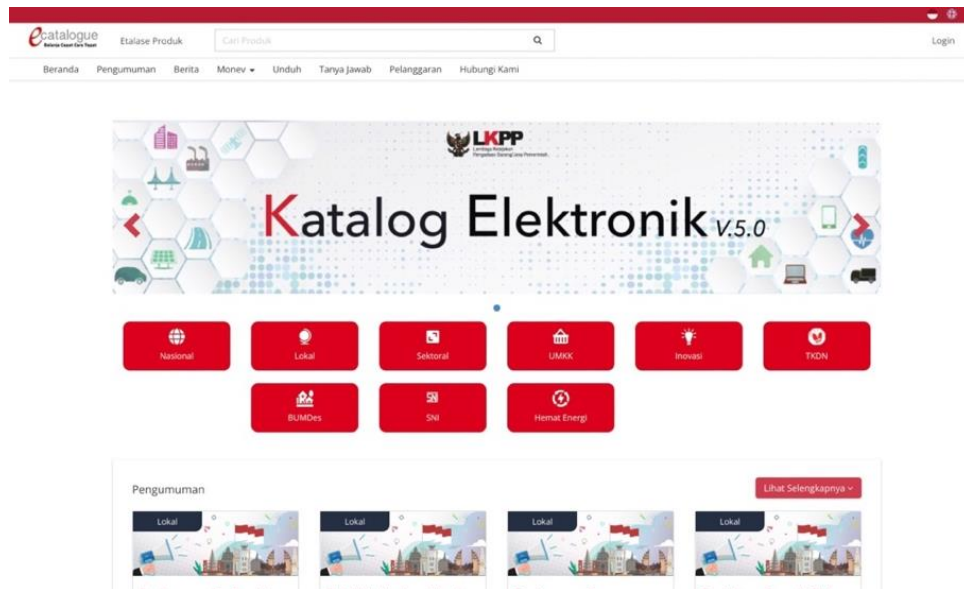
b. Misi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur Yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota Yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

2.3. Gambaran Umum Pada Pengadaan Barang dan Jasa

Indonesia mengalami perkembangan yang sudah sangat pesat. Dalam perkembangan yang pesat tersebut diterbitkan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Dalam ketentuannya pengadaan barang/ jasa berlaku secara umum, secara umum pengadaan ini dimulai dari adanya rencana, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan, pelaksanaan kontrak dan serah terima jasa. Dalam konteks pemerintah kegiatan ini dapat dilakukan melalui sumber pendanaan anggaran negara ataupun daerah yang nantinya dapat memperoleh barang atau jasa untuk kepentingan organisasi yang proses nya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk dapat memperoleh barang/jasa. Pelaksanaannya cara pengadaan barang/jasa ini dibagi kedalam dua kelompok yang terdiri melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia . Pengemlompokan ini merupakan kebutuhan barang/jasa yang nantinya akan diadakan ke dalam jenis barang/jasa.

Gambar 2. 2. Portal Katalog Elektronik



Sumber: LamanWebsite E-Katalog

Untuk menjalankan kegiatannya pengadaan tersebut harus mempertimbangkan serta memperhatikan tata nilai pengadaan, pihak terkait dalam pengadaan, penggunaan barang, peran serta usaha kecil, pengadaan barang seleksi internasional, pengadaan barang hibah luar negeri, keikutsertaannya perusahaan asing yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, mengikuti konsep ramah lingkungan, dan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pada perpres 16 tahun 2018, pengadaan barang atau jasa dalam instansi pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dimana sudah dibiayai oleh APBN/APBD dengan melalui proses identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil dari pekerjaan. Sebetulnya kegiatan ini dimulai dan diidentifikasi kebutuhan yang sebelumnya merupakan perencanaan umum pengadaan. Dalam rangka menjalankan fungsinya kementerian lembaga/institusi/perangkat daerah membutuhkan barang/jasa.

Kebutuhan ini merupakan hasil dari identifikasi yang sudah didapatkan melalui daftar keperluan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut dalam kegiatan.

Gambar 2. 3. Garis Besar Proses BPJ



Sumber: Slide Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pengadaan barang/jasa kegiatannya dilaksanakan dengan melalui dua cara yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan umum pengadaan, yang merupakan dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Cara swakelola ini yaitu pengadaan barang/jasanya.

2.4 Dinamika E-Procurement Di DPRD Kota Tangerang Selatan

E-procurement merupakan proses menjual dan membeli yang mana dalam proses tersebut dapat dijalankan secara elektronik. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut memberikan

keuntungan kepada dua belah pihak baik pihak penjual namun memberikan keberuntungan juga kepada pihak pembeli. Dalam E-procurement ini kedua belah pihak dapat mengaksesnya Dimana saja. sistem ini dapat dilakukan secara real-time. Pada perkembangannya saat ini dunia sudah dikontrol oleh big data, baik dalam pengadaan barang dan jasa secara digital tersebut akan memainkan peranan yang sangat penting karena hadirnya e-procurement tersebut memberikan banyak manfaat seperti menjadi salah satu inovasi besar baik dari segi bisnis maupun pemerintah, tidak hanya itu saja e-procurement tersebut dapat meningkatkan transparansi.

Dalam pendukungnya (Gunasekaran dan Ngai, 2008), memberikan pendapat bahwa sistem ini dapat membantu pemerintah untuk menghemat uang dan menyediakan cara yang akuntabel, efektif, serta cepat untuk mengelola pengadaan. Dilihat dalam kinerja e-procurement di DPRD Kota Tangerang Selatan dalam sejauh ini sistem tersebut dapat memfasilitasi terselenggaranya sistem e-procurement yang dipenuhi dengan tawar-menawar untuk melaksanakan kegiatan baik dalam pembelian makanan, minum alat tulis dll. Sejalanannya waktu dalam perkembangan e-purchasing tersebut di DPRD Kota Tangerang Selatan dilihat dari segi fasilitas pada E-Procurement ini memang masih terdapat kendala baik pada penyedia maupun penyedia, namun proses bertransaksi tersebut harus tetap dilakukan hal ini karena sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang atau jasa.

Tujuan dari adanya e-procurement adalah menciptakan pemerintah bersih dan transparan. Pembuatan kebijakan ini dilakukan oleh decision maker yang dimana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sistem. Tetapi pada sistem tersebut tidak selamanya akan berjalan dengan baik-baik saja, kendala pada web atau server yang down, pengimputan yang memakan waktu lama juga menjadi kendala utama dalam proses tersebut di DPRD Kota Tangerang Selatan ini. Pemerintah Daerah juga dapat mampu memaksimalkan kesiapannya dalam e-procurement, ini

menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan serta mengelola dengan baik agar sistem e-procurement tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Apabila dilihat dari segi utama tantangan yang dapat dijabarkan dalam sistem tersebut mengacu kepada kemampuan sumber daya yang dimana masih belum memaksimalkan kemampuannya untuk mengelola serta menaja sistem e-procurement tersebut.

2.5. Kondisi Geografis Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan. Secara administrative Kota Tangerang Selatan memiliki 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha. Adanya Jumlah penduduk yang berada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.593.812 jiwa yang terdiri dari 802.908 jiwa penduduk laki-laki dan 790.904 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 10.828 jiwa/km². Dahulunya Kota Tangerang Selatan ini merupakan Kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dalam pembentukannya wilayah ini berawal dari keinginan Masyarakat yang ada di lingkup Tangerang Selatan guna untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Sehingga di tahun 2000 terdapat beberapa tokoh kecamatan yang mulai menyebutnya Cipasera sebagai wilayah otonom.

Dalam perkembangannya Kota Tangerang Selatan ini berkembang sangat pesat dalam decade terakhir. Kota ini menjadi pusat petdagangan dan industry yang penting di wilayah sekitarnya. Pada letak geografis Kota Tangerang Selatan ini bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek yang merupakan area perkotaan terbesar di Indonesia. Apabila dilihat dari letak geografis Kota Tangerang Selatan ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur, tidak hanya itu saja Kota Tangerang Selatan ini juga merupakan salah satu daerah yang

menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batas wilayah geografis Kota Tangerang Selatan meliputi:

Tabel 2. 2. Batas Wilayah Geografis Kota Tangerang Selatan

Utara	Kota Tangerang
Timur	Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Depok
Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
Barat	Kabupaten Tangerang

2.6. Kondisi Topografi dan Geologi

Kota Tangerang Selatan sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah yang memiliki letak topografi relatif datar dengan kemiringan tanah yang mempunyai rata-rata 0-3% serta ketinggian antara 0-25m dpl. Daerah yang relative datar ini terdapat kecamatan yang memiliki lahan yang teksturnya bergelombang adapun apabila dilihat dari suatu wilayah kecamatan lahan bergelombang ini terdapat diperbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang dan sebagian lainnya berada di bagian Kecamatan Ciputat Timur.

Dalam kondisi geologi Tangerang Selatan pada umumnya merupakan wilayah yang terdapat batuan alluvium, batuan ini terdiri dari batuan lempung, kerikil, pasir, bongkah dan lanau. Jenis tanah yang berada di Kota Tangerang Selatan ini juga berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang pada biasanya dapat digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Namun dengan seiring berjalannya waktu pada kenyataannya makin banyak perubahan yang terjadi untuk kegiatan yang bersifat non-pertanian karena wilayah ini terdapat kandungan pasir khusus yang wilayahnya berdekatan dengan Sungai Cisadane.

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu Kota di Provinsi Banten, secara demografis kota ini memiliki populasi yang cukup besar dan terus berkembang. Pada data Sensus Penduduk Indonesia terdapat jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan sebanyak 1.376.734 jiwa, Dimana jumlah tersebut terdapat jumlah laki-laki sebanyak 687.328 jiwa dan Perempuan sebanyak 689.406 jiwa. Kota Tangerang Selatan termasuk salah satu kota industri, hal tersebut membuat banyaknya penduduk dari luar provinsi banten yang bekerja hingga menetap di Kota Tangerang Selatan.

Banyaknya penduduk luar yang menetap di Tangerang Selatan juga mempengaruhi keanekaragaman baik dari agama dan suku. Pada umumnya penduduk tersebut di dominasi oleh tiga etnis, yakni Sunda banten, Betawi dan Tionghoa. Biasanya suku Sunda Banten dominan

berada disebalah barat sepanjang aliran Sungai Cisadane. Hal ini apabila dilihat dari segi geografis karena penyebarannya berada di Serpong, Serpong Utara dan Setu.

2.8 Kondisi Perekonomian dan Strktur Ekonomi

Pada tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga diberlakukan di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 5.256.882. dalam perkembangannya PDRD Kota Tangerang Selatan sudah cenderung menunjuk pada peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahu serta dengan PDRB per-kapita. Laju Pertumbuhan Ekonomi ini memiliki nilai sebesar 6.51%, selanjutnya di tahun 2003, pada PDRB atas dasar konstan yaitu sebesar Rp. 863.517. Dalam kontribusinya Kecamatan yang telah memberikan kontribusi paling besar yaitu Kecamatan Ciputat Timur sebesar Rp. 167 trilyun atau 31,93% dari jumlah PDRB, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah paling kecil dalam kontribusinya yaitu Kecamatan Setu dengan Rp. 71 Trilyun atau 1,35%.

Struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan berdasarkan PDRB tahun 2007 didominasi oleh beberapa sektor usaha pengangkutan serta komunikasi dengan jumlah presentase sebesar 30,29%, serta terdapat pula restoran hingga perdagangan hotel dengan jumlah presentase 26,81%. Namun, tidak hanya dua sektor tersebut saja, terdapa pula sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar seperti persewaan, jasa perusahaan dan bank dengan nilai presentase sebesar 15,40%. Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan ini didominasi oleh sektor tersier.

2.9 Pendidikan

Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Indonesia, terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota itu sendiri. Pada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan memiliki 1.1.31 sekolah, 269.593 siswa dan 15.398 guru yang tersebar di Kecamatan dengan

meluputi jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kota Tangerang Selatan juga memiliki beberapa perguruan tinggi terkemuka, antara lain:

Tabel 2. 3. Perguruan Tinggi dan Jumlahnya

Nama Perguruan Tinggi	Jumlah
Perguruan Tinggi Kedinasan	2
Perguruan Tinggi Negeri	2
Perguruan Tinggi Swasta	28
Total	32

Dalam dunia Pendidikan, pemerintah setempat terlibat aktif dalam mengawasi dan mengembangkan sistem Pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memberi dan memastikan setiap warganya dapatkan akses Pendidikan yang layak dan berkualitas terhadap Pendidikan